

**SKRIPSI**

**ANALISIS HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT  
DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )  
DI KABUPATEN MAJENE**

*( Analysis of Inspectorate Supervision Results in Preventing Abuse of School  
Operational Assistance Funds (BOS) in Majene Regency )*



**ADNAN**

**C02 17 346**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2024**

**ANALISIS HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT  
DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )  
DI KABUPATEN MAJENE**



**ADNAN**  
**C02 17 346**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

**Indayani B. SE., M.Ak**  
NIDN: 0900107905

Pembimbing II

**Taufik Hidayat B. Tabawa, SE., M.Ak**  
NIP: 19950820 201903 1 016

Menyetujui:

Koordinator Program Studi Akuntansi

**Nuraeni M. S.Pd., M.Ak**  
NIP: 19831203 201903 2 006

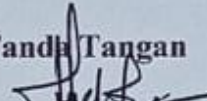
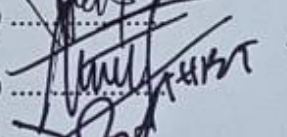
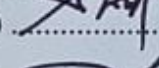
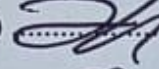
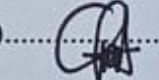
**ANALISIS HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT  
DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )  
DI KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ADNAN  
C02 17 346**

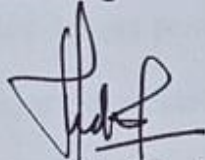
Telah diuji dan diterima Panitia ujian  
Pada Tanggal 26 Juni 2024 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Indayani B, SE., M.Ak	Ketua	1) 
2. Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak., CSRS, CSP, CTT	Sekretaris	2) 
3. Nurul Listiawati, SE., M.Acc	Anggota	3) 
4. Zulfadhli Lutfi A. Lopa, SE., Ak., MM	Anggota	4) 
5. Ahmad Mansur AM, SE., M.S.A	Anggota	5) 

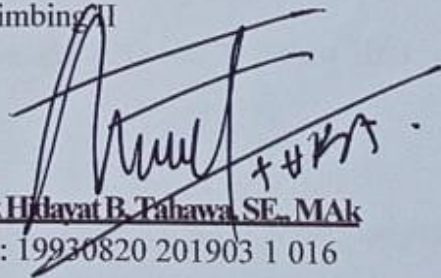
Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Indayani B. SE., M.Ak**  
NIDN: 0900107905

Pembimbing II



**Taufik Hidayat B Tahawa, SE., MAk**  
NIP: : 19930820 201903 1 016

Mengesahkan, Dekan Fakultas Ekonomi



**Dr. Dra. Emy Radiab, M.AB**  
NIP: 19670325 199403 2 001

## **ABSTRAK**

**Adnan , 2024, Analisis Hasil Pengeasaan Inspektorat dalam mencegah Penyalahgunaan Dana Bantuan Opeasional Sekolah ( BOS ) di Kabupaten Majene. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Dibimbing Oleh Pembimbing I Ibu Indayani, B dan Pembimbing II Bapak Taufik Hidayat B Tahawa.**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan tindakan antisipasi Inspektorat mencegah terjadinya Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Kabupaten Majene. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan :1).Faktor penyebab penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) adalah Interaksi Individu dalam Kelompok atau Organisasi. 2). Antisipasi yang dilakukan Inspektorat dalam mencegah penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) adalah dengan melakukan evaluasi dan sosialisasi.

**Kata Kunci : Pengawasan Inspektorat, Dana BOS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan cara menciptakan generasi bangsa yang cerdas melalui pendidikan formal atau informal demi mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Setiap anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Negara Indonesia terbagi menjadi 38 Provinsi, dan 416 Kabupaten dan Kota, Provinsi Sulawesi Barat termasuk di antaranya. Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene memiliki julukan kota pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang dimana terdapat SD/Sederajat sebanyak 169 sekolah, SMP/ sederajat sebanyak 39 sekolah, SMA/ Sederajat sebanyak 23 sekolah. Sekolah - sekolah ini tentunya mendapatkan dana BOS dari negara yang diatur dalam undang-undang.

Dana BOS sangatlah bermanfaat bagi anak-anak bangsa yang tergolong dalam ekonomi kebawah, dimana dana BOS dapat membantu anak-anak yang kurang mampu dalam urusan biaya, sehingga dengan adanya bantuan ini anak-anak bangsa tersebut dapat merasakan pendidikan yang layak bagi mereka, dimulai dari Sd sampai dengan SMA nantinya. Namun dibalik semua itu terdapat fakta yang mencengkan yang dimana dana BOS yang disalurkan tersebut terjadi penyalahgunaan, tentu saja hal tersebut dapat mengurangi manfaat dari dana tersebut, bisa jadi anak-anak bangsa yang kurang mampu dan layak mendapatkan

dana bantuan tersebut menjadi sulit untuk mendapatkannya sehingga mereka pun tidak dapat mendapat pendidikan yang layak.

Menurut Iptu Julius yang merupakan Kanit Tipikor Polres Majene,” *pada tahun 2017 terjadi penyimpangan penggunaan anggaran dan BOS yang tidak sesuai peuntukannya. Akibatnya negara dirugikan sebanyak 180 Juta Rupiah, terdapat 3 tersangka didalam kasus tersebut*”.

Oleh karena itu sebagai mahasiswa menganggap kasus ini sangat menarik untuk meneliti faktot penyebab sehingga penyalahgunaan itu bisa terjadi, kemudian bagaimana antisipasi agar hal demikian tidak terulang kembali, sehingga dana bantuan tersebut dapat terelisasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang menjadi peruntukan dana tersebut.

Salah satu unit yang memiliki wewenang malakukan audit/pemeriksaan terhadap hal tersebut adalah inspektorat daerah. Inpektorat deaerah mempunyai tugas menyelenggaran kegiatan pengawasan umum pemerintah dan tugas lain yang diberikan kapeda daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat merupakan audit internal.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi,Kota/Kabupaten secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kota/Kabupaten, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dari uraian diatas penulis pun mengangkat judul penelitian “ANALISIS HASILPENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KABUPATEN MAJENE (STUDI KANTOR INSPEKTORAT MAJENE)”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana BOS di Kabupaten Majene?
2. Bagaimana tindakan antisipasi Inspektorat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana BOS di Kabupaten Majene?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana BOS di Kabupaten Majene?
2. Untuk mengetahui bagaimana antisipasi Inspektorat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana BOS di Kabupaten Majene.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut penulis kemukakan manfaat dari penelitian ini yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai kajian terhadap teori-teori yang digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi dan diharapkan menambah khazanah pengetahuan dalam bidang auditing khususnya mengenai pengawasan Inspektorat dalam mencegah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Secara umum merupakan bekal pengetahuan mengenai penerapan teori-teori yang diperoleh selama berada dibangku perkuliahan dan diterapkan pada kenyataan yang sebenarnya didalam instansi terkhususnya kantor Inspektorat Kabupaten Majene.

#### **2. Bagi Instansi**

Bagi instansi tempat penulis dan tambahan informasi bagi kantor Inspektorat Kabupaten Majene mengenai pengawasan Inspektorat dalam mencegah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga memberikan langkah nyata yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan kinerja Instansi.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**



Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengawasan Inspektorat dalam mencegah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Majene , sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pengawasan**

Di dalam (Satriadi, 2016) pengawasan dapat di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki (Satriadi, 2016).

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pekerjaan atau tindakan yang dilakukan dalam setiap kegiatan untuk menjamin terealisasinya rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dimana dari pengawasan tersebut dapat dilakukan pengambilan tindakan perbaikan apabila diperlukan.

### **2.1.2 Syarat-syarat Pengawasan Efektif**

Menurut Simbolon dalam Fitrianingrum (2015, p.1646) syarat-syarat pengawasan harus :

1. Dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.

Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan /menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana.

2. Objektif.

Pengawasan yang objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung). Yang bersifat kuantitatif, misalnya: biaya satuan, ukuran, dan volume pekerjaan, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Adapun yang bersifat kualitatif, misalnya: program pendidikan dan latihan karyawan, program penelitian dan pengembangan administrasi negara, program peningkatan suatu pengawasan, dan sebagainya.

3. Dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.

Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu manajer pengawasan dan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. Informasi ini diperoleh dengan bermacam-macam cara sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai bendahara, kepala gudang, kepala proyek, dan sebagainya.

4. Menunjukkan penyimpangan- penyimpangan pada hal-hal yang penting.

Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan. Dengan kata lain dapat ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan.

5. Membawa tindakan perbaikan (*corrective action*).

Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggung jawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikan.

6. Fleksibel.

Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif sesuai dengan berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek, pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel pula.

7. Hemat.

Pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya pengawasan relatif hemat, bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan, pengeluaran biaya pengawasan lebih kecil dibandingkan dengan besarnya resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan.

### **2.1.3 Fungsi Inspektorat**

Fungsi Inspektorat sebagai berikut (Nugraha, 2020) antara lain:

#### **1. Koordinasi**

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Inspektorat serta melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan kebijakan teknis operasional di lingkungan Inspektorat.

#### **2. Audit**

Melaksanakan audit pelaksanaan anggaran, melaksanakan audit kinerja, melaksanakan audit investigasi, melaksanakan audit dengan tujuan tertentu serta melaksanakan audit lainnya sesuai peraturan perundangundangan.

#### **3. Review**

Melaksanakan review laporan keuangan, melaksanakan review Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, melaksanakan review Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

#### **4. Evaluasi**

Melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada unit kerja di lingkungan LAN serta melaksanakan evaluasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **5. Pemantauan**

Melaksanakan pemantauan pelaporan gratifikasi, pemantauan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan

ASN serta melaksanakan pemantauan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 6. Dukungan Teknis

Melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, melaksanakan penyusunan laporan hasil audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

### **2.1.4 Dana Bos**

#### **1. Pengertian Dana BOS**

Dalam PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 2 Tahun 2022 , Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bantuan Operasional Sekolah di kategorikan menjadi 2, antara lain:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

## **2. Komponen Penggunaan Dana BOS**

Dalam Pasal 26 PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 2 Tahun 2022,

Komponen Penggunaan Dana BOS antara lain:

- a. Komponen penggunaan dana BOS Reguler, meliputi :
  - 1) Penerimaan Peserta Didik baru;
  - 2) Pengembangan perpustakaan;
  - 3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - 4) Pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
  - 5) Pelaksanaan administrasi sekolah;
  - 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  - 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
  - 8) Penyediaan multimediapembelajaran;
  - 9) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
  - 10) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
  - 11) Pembayaran honor.
- b. Komponen penggunaan Dana Bnatuan BOS Kinerja ada 2, antara lain :
  - 1) Sekolah penggerak, meliputi :
    - Pengembangan sumber daya manusia;
    - Pembelajaran dengan paradigma baru;
    - Digitalisasi sekolah; dan
    - Perencanaa berbasis data.
  - 2) Sekolah berprestasi, meliputi:

- Asesmen talenta dan kebugaran;
- Pelatihan dan pengembangan prestasi;
- Pengelolaan data dan informasi talenta; dan
- Kegiatan aktualisasi prestasi.

### **2.1.5 Teori Diferensial Association**

Menurut Edwin H Sutherland menjelaskan bahwa teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang dimana kejahatan dielajari dalam interaksi lingkungan sosial. Teori ini mengakui adanya pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang sehingga teori ini bersifat sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas dan peranan asosiasi.

Sutherland juga mengemukakan alasan mengapa seseorang lebih memilih melanggar Undang-Undang daripada menaatinya, hal ini karena 4 unsur teori asosiasi diferensial, diantaranya yaitu:

1. Frequency, berarti seberapa seringnya individu bergaul dengan kelompok tertentu;
2. Duration, berarti lamanya individu bergaul dalam kelompok tersebut;
3. Priority, berarti masa lampau seseorang yang mempengaruhi pemahaman terhadap pergaulan kelompok tersebut;
4. Intensity, berarti reaksi individu terhadap norma yang dianut kelompoknya.

Teori ini tidak jauh berbeda dengan teori lingkungan, jika dihubungkan dengan masalah yang Penulis angkat, korupsi dana BOS yang dilakukan tenaga



kependidikan seperti Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Staff tata usaha sekolah di lingkungan sekolah merupakan hasil dari interaksi dengan kelompok tertentu sehingga tindak pidana korupsi ini melibatkan beberapa pihak, dapat dilihat dari beberapa kasus korupsi yang selalu dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama-sama dengan Bendahara Sekolah. Interaksi tersebut ditafsirkan sebagai situasi yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, ditambah dengan pengawasan yang ambigu dan kurang komplementaritas dari beberapa instansi pemerintah sehingga menciptakan kesempatan untuk melakukan korupsi dana BOS di lingkungan sekolah.

## 2.2 Tinjauan Empirik

**Tabel 2.1 Tinjauan Empirik**

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ratna (Jurnal Repository Universitas Hasanuddin ) (2016).	Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Takalar.	Penelitian ini menunjukkan bahwa audit laporan keuangan sama-sama mengacu pada	Sama-sama membahas tentang pengawasan Inpektorat terhadap pengelolaan Dana (BOS).	( Variabel X ) Pengawasan Inspektorat (Variabel Y ) Pegelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

			prosedur standar pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Takalar.		penelitian sebelumnya hanya befokus kepada seperti apa pengawasan Inspektorat. Sedangkan penelitian ini menambahkan solusi Inspektorat dalam mengawasi dana BOS di Kabupaten Majene
2.	Julianti Pontoh, Ventje Ilat, dan Hendrik Manossoh (Jurnal	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa terjadi	Sama-sama membahas mengenai kendala-kendala Inspektorat	( Variabel X ) Pengawasan Inspektorat (Variabel Y ) Pegelolaan Dana Bantuan

	<p>Unsrat) (2017).          (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu.</p>	<p>beberapa hambatan dalam pengelolaan dana BOS antara lain masalah-masalah yang terjadi karena pengawasan, sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.</p>	<p>dalam pengawasan pengelolaan Dana BOS</p>	<p>Operasional Sekolah (BOS) penelitian sebelumnya befokus kepada hambatan - hambatan inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana BOS .          Sedangkan di penelitian ini tentang bagaimana pencegahan inspektorat terhadap penyalahgunaan dana</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					BOS di Kabupaten Majene.
3.	Andika Adhyaksa (Jurnal Repository Universitas Hasanuddin ) (2020).	Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Makassar.	Perlu adanya pengawasan yang rutin setiap tahun baik dari BPK, BPKP, maupun Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah.	Sama-sama membahas tentang Fungsi Pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan Dana (BOS)	( Variabel X ) Pengawasan Inspektorat (Variabel Y ) Pegelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kota Makassar. Sedangkan sayang di Kabupaten Majene.
	Nindita Utama	Pelaksanaan pengawasan	Inspektorat dalam	Sama-sama meneliti	( Variabel X ) Pengawasan

4.	(Kemendik bud.go.id) (2014).	Inspektorat terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi di Inspektorat Kabupaten Pamekasan).	melakukan pengawasan menggunakan 3 (tiga) tahapan, yaitu audit, survey, dan review. Dari ketiga tahapan tersebut, Inspektorat mengalami banyak permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya skill dari tenaga administrasi di pihak	mengenai pengawasan serta kendala-kendala Inspektorat terhadap pengelolaan dan BOS.	Inspektorat (Variabel Y ) Pegelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penelitian sebelumnya berfokus kepada hambatan-hambatan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana BOS. Sedangkan di penelitian ini membahas mengenai pecegahan
----	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			sekolah.		terhadap penyalahgunaan dana BOS di Kabupaten Majene.
5.	Ainul Kholik (Jurnal Repository Wiraraja) (2017).	Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Inspektorat Sumenep.	Proses/ Tahapan dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang diterapkan oleh inspektorat sumenep yaitu melakukan	( Variabel X ) Pengawasan Inspektorat (Variabel Y ) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penelitian sebelumnya mencaitahu kendala-kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS.	

			review pada saat evaluasi pemeriksaan dana BOS selesai.		Sedangkan penelitian kali ini mengenai cara Inspektorat mencegah terjadinya pengalihan penggunaan dana BOS di Kabupaten Majene
--	--	--	---------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2.3 Kerangka Konseptual

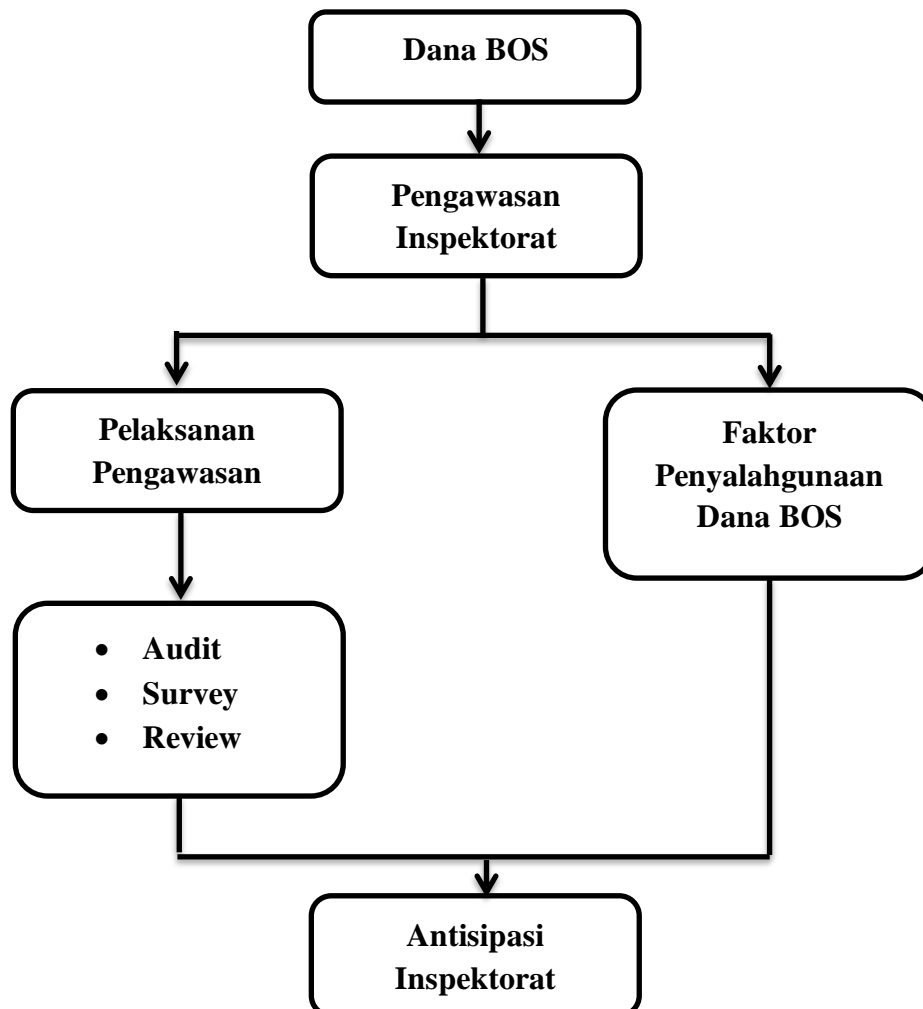
Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan program pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan cara memberikan bantuan ini. Dana BOS ini diperuntukkan bagi anak bangsa yang di jenjang umur 7-15 tahun, namun ada beberapa anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal atau informal karena beberapa alasan baik itu secara ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.

Namun dalam penyalurannya pasti ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, maka dari itu Inspektorat disini memiliki peranan penting dalam pengawasan penyaluran dana BOS tersebut, yang dimana

Inspektorat merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk menanggulangi hal tersebut, dengan melakukan pelaksanaan pengawasan antara lain Audit, Survey dan Review

Kemudian dalam proses itu akan muncul kendala-kendala Inspektorat dalam proses pelaksanaan pengawasan itu, ketika inspektorat sudah melakukan pengawasan dan dapat mengantisipasi kendala-kendala tersebut maka terciptalah pengawasan yang efektif dan maka dari itu tujuan dari terbentuknya dana BOS dapat direalisasikan sesuai dengan peruntukannya.

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**





## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2018). *Pedoman Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: BPKP.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, S., & Suryani, L. (2020). *Pengaruh Pengawasan Inspektorat dalam Mencegah Penyelewengan Dana BOS di Sekolah Dasar Kabupaten Sleman*. *Jurnal Pendidikan dan Akuntabilitas*, 8(3), 212-226.
- Haris, A., Kusmanto, H., & Mardiana, S. (2016). *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai*. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(1), 110–128. Retrived from. <https://doi.org/10.31289/jap.v6i1.1047>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: Kemendikbud.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2017). *Pedoman Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: KNKG.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugraha, H. (2020). *Profil Inspektorat*. Retrived from. [https://lan.go.id/?page\\_id=217](https://lan.go.id/?page_id=217).
- Pahleviannur, Rizal, M., Grave, Anita D., Saputra, Nur, D., Mardianto, Dedi, Sinthania, Debby, Hafrida, Lis, Bano, Vidriana Oktoviana, Susanto, Edy, E., Mahardhani, Januar, A., Amruddin, Amruddin, Mutia, Lisyah, Ahyar, Dasep B (2022). *Analisis Data Penelitian Kualitatif. In: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, Sukoharjo Jawa Tengah, pp. 137-146. ISBN 978-623-99688-1-6.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional*

*Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.*

Ratna (2016). *Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana BOS Di Kabupaten Takalar*. Retrived from.

[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5246-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5246-Full_Text.pdf)

Ridwan, M., & Kusuma, R. (2020). *Pengawasan Dana BOS oleh Inspektorat di Sekolah Dasar Kota Semarang*. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Daerah*, 9(1), 112-125.

Satriadi, H. (2016). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama*. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 190-203.

Segah, B., & Kaharap, K. (2022). *Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Retrived from.

*Anterior Jurnal*, 21(3), 27-33. <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3723>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Supardi, A., & Rizal, F. (2019). *Peran Inspektorat dalam Mencegah Penyalahgunaan Dana BOS: Studi Kasus di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(3), 65-78.

Wahyu, Utomo. 2013. *Wajib Belajar 9 Tahun*. Retrived from. <http:wawaywitzki.blogspot.com/2012/04wajib-belajar-9-tahun.htm>.

Wijaya, A., & Handayani, T. (2021). *Analisis Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 43-57.